

Primordialisme dalam Pemilihan Presiden dan Caleg Bagi Pemilih Kritis di Tanjungpinang Barat

Tengku Ananda Sapphira¹, Pitriani^{2*}

¹⁻²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Korespondensi penulis : pitrianjani633@gmail.com*

Abstract: *The Unitary State of the Republic of Indonesia lives with a pluralistic society. The existence of this pluralistic society indicates that Indonesia is filled with diversity. Starting from ethnic diversity, customs, culture, religion, and many more. Again, this diversity shows that Indonesia needs a system democratic government, where every government process requires the people's contribution so that the people continue to live side by side even though they are filled with the essence. A democratic country is a government of the people, by the people, and for the people. This means that the government exercises its power on behalf of the people. Therefore, Indonesia implementing an election system in determining leaders in Indonesia. However, in this election process there are ties of primordialism that influence how people determine their choices according to certain beliefs trusted. This research explores the existence of primordialism in elections in Indonesia, especially in West Tanjungpinang District, Tanjungpinang City. Researchers explore the primordial factors, such as customs, ethnicity, culture, religion and social groups that influence the dynamics of elections. Researchers found that Primordialism often influences voting behavior. This research too aims to find out how primordialism influences voting behavior in West Tanjungpinang District*

Keywords: *Political Primordialism, Critical Voters, Elections in West Tanjungpinang*

Abstrak: Negara Kesatuan Republik Indonesia hidup dengan masyarakat majemuk. Keberadaan masyarakat majemuk ini menandakan bahwa Indonesia dipenuhi dengan keberagaman. Mulai dari keberagaman suku, adat, budaya, agama, dan masih banyak lagi. Keberagaman ini menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan sistem pemerintahan yang demokratis, di mana setiap proses pemerintahannya memerlukan andil rakyat agar rakyat terus hidup berdampingan meskipun dipenuhi dengan Hakikat negara demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, pemerintah menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat. Oleh karena itu, Indonesia menerapkan sistem Pemilu dalam menentukan pemimpin-pemimpin di Indonesia. Namun, dalam proses Pemilu ini terdapat ikatan primordialisme yang mempengaruhi bagaimana rakyat menentukan pilihannya sesuai dengan kepercayaan tertentu yang dipercayai. Penelitian ini menggali mengenai adanya primordialisme dalam Pemilu di Indonesia, khususnya di Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang. Peneliti menelusuri hal yang menjadi faktor-faktor primordial, seperti adat, suku, budaya, agama, dan golongan sosial yang mempengaruhi dinamika Pemilu. Peneliti menemukan bahwa primordialisme kerap menjadi pengaruh terhadap perilaku pemilih. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seperti apa primordialisme mempengaruhi perilaku pemilih di Kecamatan Tanjungpinang Barat.

Kata kunci: Primordialisme Politik, Pemilih Kritis, Pemilu di Tanjungpinang Barat

1. PENDAHULUAN

Primordialisme dalam masyarakat majemuk merupakan fenomena yang hampir pasti terjadi. Kita sering menyaksikan praktik-praktik primordialisme dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam struktur perusahaan dan politik, dalam konteks perusahaan pemimpinnya cenderung memilih orang-orang dari suku atau etnis yang sama untuk menjadi orang kepercayaan. Sementara dalam politik, praktik primordialisme bisa menjadi sangat mencolok, di mana politisi sering memanfaatkan identitas primordial seperti suku, etnis, atau agama untuk memperoleh dukungan politik. Di Indonesia, meningkatnya sentimen identitas primordial telah memicu timbulnya kesadaran politik baru dan sentimen kedaerahan sejak era demokrasi reformasi dimulai. Fenomena ini tercermin dalam berbagai upaya, mulai dari

penggabungan nilai-nilai primordial dalam peraturan daerah, pemisahan wilayah administratif, tuntutan untuk mendapatkan otonomi khusus, hingga munculnya gerakan separatisme. Semua ini menunjukkan tantangan internal yang signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Primordialisme dalam pengertian harfiahnya merujuk pada sebuah konsep yang mengaitkan individu atau kelompok dengan asal-usul mereka, termasuk ras, tradisi, tempat kelahiran, dan lain-lain. Konsep ini menjadi bagian yang sangat melekat dalam kepercayaan dan identitas suatu masyarakat, yang memengaruhi pandangan dan pola pikir mereka secara keseluruhan. Dari konsep primordialisme ini, muncul perilaku primordial yang kemudian menjadi bagian penting dari dinamika politik. Contohnya, masyarakat cenderung mendukung atau memilih kandidat yang memiliki latar belakang yang mirip dengan mereka dalam konteks perlombaan politik. Secara umum, primordialisme meyakini bahwa kelompok sosial dapat didefinisikan oleh faktor-faktor seperti wilayah geografis, budaya, agama, organisasi, dan bahasa, yang dianggap sebagai karakteristik yang diberikan secara objektif dan sulit untuk diperdebatkan.

Primordialisme menciptakan ikatan kuat bagi individu dalam konteks sosial, yang didasarkan pada identitas yang diperoleh sejak lahir, seperti suku bangsa, kepercayaan, ras, adat-istiadat, dan daerah kelahiran. Nilai-nilai budaya yang ditanamkan sejak kecil dari suku bangsa tersebut menjadi bagian integral dari individu, sehingga menyatukan masyarakat dengan latar belakang suku yang berbeda menjadi tantangan yang kompleks dan memakan waktu. Sikap primordialisme sangat berpengaruh terhadap sikap individu dalam lingkungan sosialnya, dapat membuat seseorang memiliki keyakinan yang kuat terhadap kebudayaan dan tingkat loyalitas yang tinggi terhadap kelompoknya. Dalam hal ini, tidak jarang pula primordialisme tertanam pada diri pemilih-pemilih pada Pemilu di Indonesia. Banyak masyarakat yang memilih berdasarkan kepercayaan-kepercayaan tertentu, seperti berdasarkan kesamaan suku, budaya, kepercayaan oleh masyarakat sekitarnya, bahkan agama. Masyarakat yang menganut primordialisme ini akan memilih Caleg dan Capresnya berdasarkan kepercayaan itu saja, tanpa memikirkan kualitas dan visi serta misi dari Caleg dan Capres tersebut. (Syafitri & Warsono, 2021)

Tingginya intensitas primordialisme mencerminkan bahwa politik dalam dunia kita masih terjebak dalam paradigma yang primitif dan tradisional. Paradigma ini dianggap primitif dan tradisional karena sebagian besar pemimpin politik baik di tingkat nasional maupun daerah masih seringkali memanfaatkan sentimen-sentimen primordial seperti kesukuan, etnis, dan agama untuk kepentingan politik mereka. Kepentingan politik diartikan sebagai upaya untuk merebut jabatan politik baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun dalam struktur birokrasi

pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor identitas yang bersifat primordial, dan belum sepenuhnya melampaui tingkat primitif dan tradisional dalam menyikapi dinamika sosial dan politik.

Fenomena primordialisme dapat dilihat melalui teori sosiologi. Salah satunya ialah teori identitas sosial. Teori identitas sosial mengacu pada konsep yang menjelaskan bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka dalam konteks kelompok sosial tertentu. Hal menyatakan bahwa identitas individu bukan hanya tentang diri mereka sendiri, tetapi juga tentang bagaimana mereka dilihat oleh kelompok-kelompok sosial yang mereka anggap penting. Teori ini menekankan pentingnya identitas kelompok dalam membentuk perilaku, persepsi, dan interaksi sosial individu.

Indonesia merupakan negara demokratis. Pernyataan ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Demokrasi sendiri adalah suatu bentuk kekuatan rakyat dalam suatu pemerintahan dalam memegang kedaulatannya. Demokrasi dianggap sebagai suatu tuntutan pada era modern saat ini demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Demokrasi juga dipandang sebagai suatu gagasan atau pandangan hidup yang di dalamnya mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, termasuk perlakuan yang sama bagi semua warganya. Dalam demokrasi, pergantian kepala pemimpin sering dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk primordialisme.

Salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi ialah Indonesia. Indonesia menduduki kursi sebagai negara terbaik dalam menjalankan demokrasinya di Asia Tenggara. Demokrasi di Indonesia salah satunya diberlakukannya sistem Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu menjadi fondasi utama bagi negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Ini bukan sekadar sebuah proses, melainkan sebuah peristiwa besar yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, terutama rakyat Indonesia di berbagai wilayahnya. Pemilu tidak hanya menjadi momen penting dalam proses politik, tetapi juga merupakan perayaan demokrasi yang menandai keterlibatan luas dari berbagai lapisan masyarakat dalam menentukan arah masa depan negara. Melalui Pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pilihannya dan secara aktif berkontribusi dalam pembentukan pemerintahan yang mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Dengan adanya Pemilu, diharapkan terjaminnya pencapaian cita-cita dan tujuan nasional, yang di mana tujuan tersebut terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana dalam perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat serta pemerintahan negara

Indonesia yang demokratis. Hal ini didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sholahuddin, Abdu et al., 2023).

Demokrasi mengajarkan konsep bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Dalam konsep ini, rakyat memiliki kesadaran untuk menciptakan aturan yang menguntungkan dan menjaga hak-hak mereka. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan sebuah perjanjian bersama yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bertujuan untuk menjamin serta melindungi hak-hak rakyat. Perjanjian ini dikenal sebagai Konstitusi, yang menjadi pijakan utama dalam menjaga demokrasi dan kebebasan bermasyarakat.

Era Orde Baru telah mengungkapkan kepada rakyat Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi berdampak merusak terhadap konstelasi politik dan stabilitas negara, serta menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk memperkuat demokrasi, yang mencakup upaya dalam proses pendemokrasian sistem politik negara. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada rakyat dalam berpartisipasi dalam proses politik, menjaga kedaulatan rakyat, dan memastikan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif oleh lembaga legislatif. Lembaga legislatif dianggap sebagai wadah yang mewakili suara dan aspirasi dari berbagai komponen masyarakat. Salah satu karakteristik utama dari negara demokrasi adalah penyelenggaraan Pemilu secara terjadwal dan berkala, yang memungkinkan rakyat untuk secara aktif memilih pemimpin mereka dan mengambil bagian dalam proses politik secara keseluruhan (Simamora, Larshen , Yunus,

Karl Marx, seorang filsuf terkemuka asal Jerman, mengungkapkan pandangannya bahwa Pemilihan Umum tidak sekadar merupakan proses politik yang indah, melainkan juga memiliki aspek-aspek yang penting dan ironis. Bagi Marx, Pemilihan Umum merupakan satu-satunya cara bagi masyarakat biasa untuk berperan aktif dalam kehidupan politik, memberikan mereka kesempatan yang langka untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Di Indonesia, perjalanan menuju demokrasi telah menunjukkan kemajuan, terutama dengan adanya penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala. Saat ini, Pemilihan Umum bukan hanya tentang mobilisasi massa, tetapi juga membuka pintu bagi berbagai pelaku politik untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam membentuk masa depan negara. (Ir & Ariffin, 2024). Indonesia hidup dengan prinsip dasar pemerintahan yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka Pemilu harus diadakan di setiap sudut wilayah negara. Pelaksanaan Pemilu Legislatif pada tahun 2009 menandai tonggak sejarah politik modern Indonesia karena merupakan proses di mana wakil rakyat dipilih oleh rakyat sendiri, melalui pemungutan suara yang menghasilkan pemilihan terbanyak. Pemilu dianggap sebagai

instrumen penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER), serta jujur dan adil (JURDIL). Melalui Pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih para perwakilan mereka dalam pembentukan pemerintahan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Dalam proses Pemilu, individu yang memiliki hak suara dikenal sebagai pemilih. Mereka adalah individu yang memenuhi syarat untuk mengungkapkan hak politik mereka dengan memilih kandidat dalam perlombaan politik. Pemilih adalah bagian dari masyarakat yang memiliki keyakinan dan prinsip tertentu, yang kemudian tercermin dalam bentuk dukungan terhadap institusi politik, seperti partai politik. Peran pemilih sangat penting dalam proses pemilihan, karena hak politik mereka menjadi fokus utama dalam acara tersebut. Mereka memiliki kebebasan penuh untuk membuat pilihan mereka dalam proses pemilihan tersebut. Secara esensial, perilaku pemilih ditentukan oleh kecenderungan individu untuk membuat keputusan pemilihan mereka. Fenomena perilaku pemilih menjadi subjek yang menarik perhatian, karena konteksnya sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti yang diungkapkan oleh Schumpeter, pemilih terpapar pada berbagai informasi politik yang bervariasi dan sering kali bertentangan, yang berasal dari berbagai sumber yang beragam.

Ketika seorang pemilih membuat keputusan yang tidak tepat dalam memilih seorang kandidat dalam kontes politik, konsekuensinya tidak akan langsung terasa tetapi akan memiliki dampak yang signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini berkaitan erat dengan pentingnya suara dalam sistem demokrasi. Dalam sistem ini, hasilnya akan terlihat jelas ketika mayoritas masyarakat membuat keputusan yang serupa. Dalam konteks ini, keinginan dan preferensi individu yang hanya sedikit akan sulit untuk mempengaruhi arah kebijakan secara keseluruhan atau bahkan tidak memiliki kejelasan arah untuk masa depan. Namun, yang menarik dalam demokrasi adalah bahwa keputusan individu menjadi lebih berpengaruh ketika mereka memiliki kemampuan untuk memengaruhi persepsi publik terhadap isu tertentu yang mereka yakini. Dengan demikian, pengaruh individu dalam demokrasi dapat diperkuat ketika mereka memiliki kapabilitas untuk membentuk opini publik tentang isu-isu yang mereka anggap penting.

Dalam pelaksanaan Pemilu diperlukan sikap fair dari setiap anggota masyarakat, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik, bahkan penyelenggara Pemilu. Sikap ini dilakukan supaya terus menjaga kualitas pemilu yang adil dan tanpa adanya pemihakan terhadap kepentingan individu maupun kelompok tertentu yang dapat menyebabkan hasil pemilu tidak memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilu yang kredibel adalah Pemilu

yang diselenggarakan dengan seadil-adilnya. (Sholahuddin, Abdu et al., 2023) Dalam proses Pemilu, terdapat beragamnya perilaku masyarakat dalam memilih.

Primordialisme terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya di Kota Tanjungpinang. Tanjungpinang merupakan ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu kecamatan di Kota Tanjungpinang ini adalah Kecamatan Tanjungpinang Barat. Kebudayaan dan norma-norma sosial yang berkembang di Kecamatan Tanjungpinang Barat terkait dengan pemilu mungkin mencakup keterlibatan yang aktif dalam proses pemungutan suara, tradisi berdiskusi politik di lingkungan sekitar, dan partisipasi dalam kegiatan kampanye lokal.

Secara umum, masyarakat dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan ciri-cirinya, yakni masyarakat homogen, masyarakat majemuk, dan masyarakat heterogen. Masyarakat homogen sering ditemukan dalam entitas besar seperti Jepang, di mana anggotanya memiliki asal-usul dan budaya yang seragam. Sementara itu, masyarakat majemuk terdiri dari berbagai suku bangsa yang merupakan bagian dari satu bangsa, seperti Indonesia atau Amerika. Masyarakat heterogen memiliki karakteristik khusus, seperti penyesuaian pranata-pranata utama berdasarkan budaya suku bangsa oleh pemerintah nasional, kekuatan politik suatu bangsa yang lemah melalui sistem nasional yang berdasarkan solidaritas, adanya alternatif pranata yang bertujuan untuk menangani perbedaan dan keagamaan. Masyarakat Kota Tanjung Pinang dikategorikan sebagai masyarakat heterogen karena memiliki keragaman dan variasi yang signifikan dalam hal etnis, budaya, agama, serta latar belakang sosial ekonomi. Di Tanjung Pinang, terdapat beragam etnis dan budaya yang berdampingan, seperti Melayu, Tionghoa, Bugis, dan Jawa, yang membentuk keragaman yang kaya dalam komunitas tersebut. Selain itu, terdapat juga variasi dalam keyakinan agama dan kondisi sosial ekonomi penduduknya. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Tanjung Pinang memiliki ciri-ciri masyarakat heterogen yang beragam dan pluralistik.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkap pandangan dan pengalaman pemilih kritis terkait fenomena primordialisme dalam pemilihan presiden dan caleg di Tanjungpinang Barat. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berorientasi pada pemahaman fenomena sosial atau kemanusiaan dari sudut pandang individu yang terlibat dalam fenomena tersebut. Pendekatan ini menekankan pengumpulan data deskriptif yang mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena memberikan peluang bagi peneliti untuk menggali secara mendalam persepsi dan pengalaman partisipan dalam konteks sosial dan budaya.

Metodologi yang digunakan untuk melihat Primordialisme Terhadap Pemilih Kritis di Kecamatan Tanjungpinang Barat merupakan bagian penting dari studi ilmiah yang berkaitan dengan politik dan perilaku pemilih. Primordialisme mengacu pada gagasan bahwa identitas etnis, agama, atau budaya secara inheren melekat pada individu dan memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan pandangan politik mereka. Dalam konteks pemilihan umum, pemahaman tentang bagaimana primordialisme memengaruhi pemilih kritis dapat memberikan wawasan yang berharga dalam strategi kampanye, penelitian survei, dan pengembangan kebijakan.

Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data dari informan yang relevan, kemungkinan pemilih di suatu wilayah atau negara, dengan melakukan wawancara, data sekunder, dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada, seperti hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah, buku, dan sebagainya. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya, seperti mewawancarai tokoh atau orang tertentu untuk mendapatkan data. Peneliti juga akan mewawancarai masyarakat di Kecamatan Tanjungpinang Barat. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola atau hubungan antara variabel primordialisme dan tingkat pemilih kritis.

Hasil penelitian ini memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman terhadap faktor-faktor primordialisme dalam partisipasi politik pemilih. Dengan menganalisis fenomena ini dari sudut pandang sosiologi, kita dapat melihat bagaimana aspek-aspek seperti identitas suku, agama, dan ikatan kekeluargaan dapat menjadi penentu utama dalam pemilihan politik. Lebih lanjut, penelitian ini dapat mengungkap dinamika kompleks di balik perilaku pemilih, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih mendalam daripada sekadar platform politik atau program kandidat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keterkaitan antara faktor-faktor primordialisme dan partisipasi politik, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mempromosikan keterlibatan politik yang inklusif dan berkelanjutan di masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Identitas Sosial

Teori Identitas Sosial adalah konsep dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa identitas individu tidak hanya terbentuk oleh karakteristik pribadi, tetapi juga oleh afiliasi dan identifikasi dengan kelompok sosial tertentu, seperti kelompok etnis, agama, atau profesi. Ini berarti bahwa bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dipengaruhi oleh hubungannya

dengan kelompok- kelompok ini dan bagaimana kelompok-kelompok ini dilihat oleh masyarakat luas (Kusyadi et al.,)

Pada dekade 1970-an hingga 1980-an, Henri Tajfel dan John Turner mulai mengembangkan dan merumuskan teori ini dalam bidang sosiologi. Menurut Henri Tajfel, identitas sosial merupakan bagian integral dari konsep yang melekat pada individu, yang diperoleh melalui pengetahuan tentang diri sendiri serta perasaan kesetaraan dan nilai-nilai emosional terhadap keanggotaan dalam suatu kelompok sosial. Sementara itu, menurut pendapat yang lain yang dikemukakan oleh John Turner dan Oakes, identitas sosial merupakan komponen penting dari proses interaksi sosial-psikologis, dan menekankan bahwa pendekatan individualistik tidak selalu relevan dalam memahami permasalahan.

Menurut Henri Tajfel, identitas sosial adalah konsep yang tercermin dalam pengetahuan individu tentang keanggotaannya dalam sebuah kelompok sosial. Teori identitas sosial ini menggambarkan bagaimana perilaku kelompok tercermin dalam perilaku sosial, menyoroti interaksi antara proses psikologis dan sosial yang memiliki fungsi tertentu. Jackson dan Smith menawarkan empat faktor yang menyebabkan identitas sosial, yaitu:

- a. Persepsi antar kelompok, di mana status dan reputasi kelompok memengaruhi cara individu mengidentifikasi diri mereka dalam kelompok tersebut.
- b. Daya tarik in-group, yang menunjukkan bahwa individu cenderung menganggap kelompok mereka sendiri lebih baik.
- c. Keterkaitan pada keyakinan, menyoroti hubungan emosional individu dengan kelompok sosialnya.
- d. Depersonalisasi, di mana individu menginternalisasi nilai-nilai kelompok mereka tetapi mungkin juga menghadapi konflik internal karena meninggalkan ciri khas kelompok mereka.

Selanjutnya, identitas sosial juga merupakan fokus utama dalam pengelompokan individu berdasarkan identitas personal dan persepsi masyarakat sekitar. Ini menegaskan bahwa keanggotaan dalam kelompok adalah komponen kunci dalam teori identitas sosial. dan sosial-psikologis tersebut.

Teori identitas sosial menjelaskan perilaku antar kelompok berdasarkan perbedaan status kelompok, legitimasi, stabilitas yang dipersepsikan karena perbedaan tersebut, dan kemampuan dalam berpindah kelompok. Meskipun beberapa peneliti menggunakan istilah yang sama untuk identitas kolektif, teori ini tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi kategorisasi sosial. Kesadaran akan keterbatasan teori identitas sosial mendorong pengembangan teori kategorisasi diri oleh John Turner dan rekan-rekannya. Ini membangun

gagasan yang lebih umum tentang proses pembentukan diri dan kelompok. Disarankan menggunakan istilah pendekatan identitas sosial untuk menggambarkan kontribusi bersama antara kedua teori tersebut.

Menurut teori identitas sosial, setiap tindakan individu dalam interaksi sosialnya dipengaruhi oleh keinginan mereka untuk mempertahankan identitas sosial yang positif. Ini dicapai melalui perbandingan sosial, yang merupakan proses untuk menilai posisi dan status identitas sosial seseorang dalam konteks kelompok atau masyarakat. Proses perbandingan sosial ini terjadi ketika individu membandingkan diri mereka dengan orang atau kelompok lain. Melalui perbandingan ini, individu dapat membuat penilaian spesifik tentang identitas sosial mereka dan bagaimana hal itu berkaitan dengan identitas sosial lainnya.

Ketika identitas sosial mengalami degradasi, baik dalam skala individu maupun kelompok, upaya selalu dilakukan untuk mempertahankan identitas sosial yang positif dan meningkatkan citra. Mobilitas sosial dan perubahan sosial merupakan dua cara di mana masyarakat bekerja menuju pencapaian identitas sosial yang lebih positif dalam konteks makro-sosial, seperti kelompok dan komunitas.

Dalam konteks pemilihan umum legislatif, konsep primordialisme dapat dianalisis melalui teori sosial identitas. Pendekatan ini menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi dukungan terhadap calon legislatif berdasarkan aspek suku, ras, dan kebudayaan karena melibatkan isu identitas yang berkaitan dengan pemimpin dan anggota kelompok. Teori ini meyakini bahwa keterlibatan dalam kelompok yang signifikan akan membentuk sikap, perasaan, dan perilaku seseorang. Pemimpin dan anggota kelompoknya tidak hanya menentukan diri mereka berdasarkan identitas dan hubungan personal, tetapi juga berdasarkan identitas sosial yang dipengaruhi oleh makna kelompok dan peran dalam kelompok. Teori interaksi sosial dan primordialisme memiliki relevansi dengan pemilu legislatif dalam konteks bahwa pandangan, identitas, dan hubungan sosial yang mendasari primordialisme dapat memengaruhi interaksi politik dan preferensi pemilih dalam pemilihan legislatif. Misalnya, identitas etnis, agama, atau budaya dapat mempengaruhi cara orang memilih calon atau partai politik, dan juga bagaimana politisi berinteraksi dengan pemilih dalam kampanye. (Nugraha et al., 2020)

Primordialisme dalam pemilu

Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan langsung memungkinkan rakyat untuk memberikan suara secara langsung tanpa perantara, sesuai dengan keinginan dan nurani mereka. Semua

warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk ikut serta dan memberikan suara mereka tanpa diskriminasi. Kebebasan dalam pemilihan berarti setiap warga negara dapat memilih tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dengan jaminan keamanan untuk melaksanakan hak tersebut sesuai dengan kepentingan dan nurani mereka. Pemilihan yang rahasia menjamin bahwa pilihan pemilih tidak akan diketahui oleh siapa pun, menjadikan pemilihan sebagai sarana untuk menentukan arah kepemimpinan negara atau daerah sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam konteks demokrasi yang semakin ditekankan di seluruh dunia, pemilihan yang demokratis menjadi syarat penting dalam menegakkan kepemimpinan yang representatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Pemilihan umum memiliki peran utama dalam menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili kehendak rakyat, sehingga menjadi salah satu alat legitimasi kekuasaan yang penting.

Primordialisme adalah keterikatan yang kuat seseorang dalam kehidupan sosialnya terhadap aspek-aspek yang berasal sejak lahir, seperti suku, kepercayaan, ras, tradisi, tempat kelahiran, dan sebagainya. Primordialisme muncul ketika ada sesuatu yang dianggap istimewa atau penting dalam suatu kelompok, seperti agama, budaya, dan suku. Ini melibatkan sikap mempertahankan integritas kelompok terhadap ancaman dari luar. Nilai-nilai yang terkait dengan sistem kepercayaan, seperti nilai-nilai agama, juga turut berperan dalam fenomena ini.

Menurut Retfi (2017) yang mengutip Paul Lazarsfeld (1944), pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan pengelompokan sosial, seperti pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang sosial yang bersifat primordial. Hal ini tentu memengaruhi keputusan politik seseorang. Strategi pemasaran juga dapat dimanfaatkan oleh calon legislatif untuk menarik perhatian pada loyalitas yang didasarkan pada faktor-faktor primordial dari pemilih. (Mahendra, Ida, Bagus et al.,)

Ciri-ciri kuatnya ikatan primordial yang masih berakar, seperti yang ditunjukkan melalui sentimen regionalisme, kesukuan, dan variasi pendekatan terhadap agama tertentu, dapat dilihat dalam pola budaya politik yang tercermin dalam hierarki masyarakat di mana elit politik secara langsung memanfaatkan dan berinteraksi dengan struktur sosial dan subkultur untuk merekrut dukungan (Rinenggo, 2022).

Kelompok masyarakat terbentuk berdasarkan faktor-faktor seperti wilayah, kepercayaan, budaya, bahasa, dan institusi sosial. Primordialisme merujuk pada ikatan yang alami dalam suatu komunitas sosial, yang menunjukkan keaslian dan akar yang membentuk identitas sejak awal. Ini juga mencerminkan sensitivitas individu dan mempromosikan hubungan antara masyarakat yang didasarkan pada nilai, norma, kebiasaan, dan tradisi etnis, budaya, dan suku (Fadhlan & Azizah, 2022).

Sikap primordialisme memiliki dampak besar terhadap pola perilaku individu dalam interaksi sosial. Hal ini dapat memperkuat hasil budaya individu dan menciptakan tingkat loyalitas yang tinggi terhadap kelompoknya. Ketidakmampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat multikultural dapat menyebabkan sikap primordialisme ini memicu konflik sosial yang mengancam harmoni antara penduduk (Syafitri & Warsono, 2021).

Primordialisme, diperkenalkan oleh Edward Shils (1957), mengidentifikasi berbagai ikatan sosial yang terdiri atas ikatan personal, primordial, dan sakral, yang masih relevan dalam konteks dunia modern. Pendekatan ini menyoroti karakteristik geografis, agama, budaya, bahasa, dan struktur sosial dalam membentuk identitas kelompok. Tantangan primordialisme cenderung muncul dari beberapa sebab yang sering kali timbul bersamaan dan memiliki tujuan yang berlawanan (Chaniago & Sardini, 2018). Secara deskriptif, masalah-masalah yang muncul meliputi:

- a. Hubungan darah, di mana kekeluargaan menjadi penting karena hubungan biologis terbatas, sehingga pengenalan lebih bersifat hubungan keluarga yang bersifat sosiologis seperti kesukuan.
- b. Ras, yang meskipun mirip dengan kesukuan dalam teori etno-biologis, sebenarnya memiliki perbedaan signifikan dalam ciri-ciri fisik seperti warna kulit, bentuk muka, tinggi badan, dan bentuk rambut. Masalah perkauman di Malaya terutama timbul dari perbedaan ini.
- c. Bahasa, sering menjadi sumber kebingungan terutama di India dan Malaya. Meskipun bahasa kadang dipandang sebagai sumber konflik nasional, perbedaan bahasa tidak selalu mengarah pada perpecahan sosial yang besar.
- d. Daerah, yang menjadi faktor penting di hampir semua tempat di dunia, terutama di daerah-daerah geografis yang heterogen.
- e. Agama, yang menjadi faktor utama dalam menghambat atau menggagalkan perasaan kebangsaan di berbagai negara.
- f. Kebiasaan, yang sering kali menjadi dasar bagi perpecahan nasional, terutama ketika satu kelompok merasa lebih unggul secara intelektual dan kesenian. Namun, perlu dicatat bahwa kelompok yang berbeda dapat menjalankan gaya hidup yang sama.

Primordialisme dalam pemilu melibatkan pemilih yang termasuk dalam kategori primordial, di mana mereka yang memilih calon berdasarkan faktor-faktor seperti agama, suku, atau keturunan mereka. Mereka cenderung menempatkan nilai-nilai dan identitas kelompok mereka di atas pertimbangan rasional atau kepentingan yang lebih luas (Ir & Ariffin,)

Bagi mereka, simbol-simbol yang terkait dengan afiliasi mereka memiliki makna yang sangat mendalam dan suci, sehingga memengaruhi keputusan mereka dalam pemilihan. Tipe pemilih ini biasanya cenderung loyal terhadap calon atau partai yang diidentifikasi dengan nilai-nilai atau identitas primordial mereka, bahkan jika itu bertentangan dengan kepentingan pribadi atau kebijakan yang lebih luas.

Primordialisme dalam konteks pemilu merujuk pada pengaruh kuat identitas suku, agama, atau kedaerahan dalam penilaian terhadap calon-calon politik. Hal ini dapat memengaruhi preferensi pemilih dan menjadi faktor penting dalam menentukan elektabilitas pasangan calon. Misalnya, seorang calon yang memiliki kesamaan latar belakang primordial dengan pemilih dapat memperoleh dukungan lebih besar karena rasa kohesifitas dan identifikasi yang kuat (Sejati, Satryo & Hakim, Ahmad,)

Primordial menekankan pada keaslian dan kesamaan primordial, seperti suku, etnis, atau agama, sebagai fondasi utama identitas sosial seseorang. Dalam konteks politik, primordialisme dapat memobilisasi solidaritas antarindividu atau kelompok yang merasa terikat oleh kesamaan primordial tersebut. Sebagai contoh, seorang calon legislatif yang berhasil mencalonkan diri karena merupakan penduduk asli Tanjungpinang, menunjukkan bagaimana asal-usul atau keaslian lokal dapat menjadi faktor kunci dalam mendapatkan dukungan dalam arena politik (Jonathan, Dito et al., 2019)

Primordialisme dalam pemilihan umum memiliki pro dan kontra yang signifikan. Di satu sisi, kebanggaan akan identitas budaya dan etnis dapat memperkuat solidaritas dalam kelompok tersebut, menghasilkan dukungan yang kuat dalam pemilihan. Namun, pada sisi lain, primordialisme dapat memperkuat polarisasi dan konflik antar kelompok, menghalangi proses demokratis yang inklusif dan mengarah pada diskriminasi dan ketidaksetaraan.

Primordialisme dalam konteks pemilu mengacu pada penekanan identitas etnis, agama, atau budaya untuk memenangkan dukungan politik. Ini bisa berdampak negatif karena mengabaikan isu-isu substantif dan merusak kerukunan sosial. Sebaliknya, fokus pada platform dan kebijakan yang konkret dapat memperkuat demokrasi yang inklusif.

Menurut Rauf, konflik politik dan konflik sosial memiliki kombinasi yang unik ketika primordialisme terlibat di dalamnya. Konflik politik mencerminkan solidaritas politik atau kesetiaan politik, berbeda dengan konflik sosial yang dapat timbul dari masalah solidaritas primordial. Kesetiaan politik bisa berubah ketika kepentingan tidak terpenuhi karena sifatnya yang pragmatis, sementara kesetiaan primordial bersifat alami dan melekat pada individu. Solidaritas sosial tidak muncul dari pertimbangan rasional tetapi dari emosional. Kombinasi antara konflik, penguasa politik, dan primordialisme dapat memiliki dampak seperti lemahnya

kontrol terhadap penguasa politik, mengganggu stabilitas politik, dan memungkinkan manipulasi oleh penguasa politik.

Primordialisme politik dalam pemilihan umum seringkali mengarahkan pemilih untuk memilih calon legislatif berdasarkan afiliasi etnis atau daerah asal mereka, daripada berdasarkan program atau kualifikasi. Hal ini dapat mempengaruhi dinamika politik dan representasi dalam pemilihan umum. Pemilih yang memilih calon legislatif berdasarkan unsur primordial kedaerahan cenderung mempertimbangkan asal daerah calon tersebut sebagai faktor utama, tanpa memperhatikan kualifikasi atau visi misi calon tersebut. Hal ini bisa membatasi pemilihan yang berbasis pada kepentingan yang lebih luas dan lebih penting bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan kampanye, iming-iming janji dari seorang calon legislatif yang berasal dari Tanjungpinang Barat dapat menjadi faktor penting bagi pemilih yang melihat dari unsur primordial kedaerahan. Pemilih yang mengidentifikasi diri mereka dengan daerah tersebut mungkin cenderung lebih tertarik untuk memilih calon yang berasal dari wilayah yang sama, tanpa mempertimbangkan secara mendalam kualifikasi atau platform politik calon tersebut. Cukup umum dalam politik, di mana faktor kedaerahan dan rekam jejak sering kali memainkan peran penting dalam menentukan pemenang pemilihan. Bagus jika caleg tersebut memenuhi janji-janjinya setelah terpilih. dalam konteks politik, strategi penggunaan uang bisa menjadi faktor penting dalam memperoleh dukungan atau kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dapat mencakup berbagai hal, seperti program pembangunan, bantuan sosial, atau kampanye informasi. Kampanye untuk pemilihan calon legislatif biasanya melibatkan pertemuan publik, pemasangan spanduk, iklan di media, serta penggunaan media sosial. Mereka biasanya berfokus pada platform politik, janji kampanye, dan visi untuk masyarakat.

Sistem primordialisme kedaerahan mengacu pada kecenderungan seseorang untuk memilih pemimpin atau calon legislatif berdasarkan asal daerah atau suku. Ini bisa menjadi daya tarik bagi sebagian orang karena mereka mungkin merasa lebih terhubung dengan calon tersebut secara budaya atau sosial. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan desentralisasi, terjadi peningkatan dalam pemanfaatan aspek-aspek primordial seperti kebangsaan dan hubungan keluarga dalam persaingan untuk mendapatkan jabatan publik dan posisi strategis di pemerintahan lokal. Hal ini mencakup penekanan pada identitas etnis, dominasi politik oleh keluarga atau dinasti tertentu, peran yang semakin kuat dari elit lokal, serta penekanan pada tradisi dan identitas lokal.

Pemilih memiliki peran penting dalam memilih calon legislatif dari perspektif primordial karena pilihan mereka mencerminkan nilai-nilai dan identitas yang berkaitan

dengan kelompok primordial mereka, seperti etnis atau agama. Pemilih dapat memilih caleg yang mewakili dan memperjuangkan kepentingan kelompok mereka, namun juga penting bagi mereka untuk mempertimbangkan kompetensi dan program kerja calon tersebut. Pemilihan caleg atas dasar kewilayahan dalam konteks seperti itu bisa dikaitkan dengan hubungan primordial yang bersifat lokalitas atau kebangsaan. Dalam hal ini, warga Tanjungpinang mungkin merasa bahwa caleg yang berasal dari wilayah mereka lebih memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Mereka mungkin percaya bahwa caleg lokal memiliki keterikatan yang lebih kuat dengan komunitas dan lebih mungkin untuk bertanggung jawab atas tugas mereka sebagai wakil rakyat. Namun, penting untuk diingat bahwa selain faktor primordial, kompetensi dan integritas calon juga harus dipertimbangkan secara serius dalam proses pemilihan.

Kinerja yang nyata dan dukungan kepada warga yang membutuhkan menjadi faktor utama mengapa Caleg A berhasil memenangkan pemilu untuk yang kedua kalinya. Tindakan konkret seperti meningkatkan kebersihan lingkungan dan memberikan bantuan kepada warga yang kurang mampu tentu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat di daerah Tanjungpinang Barat.

Pemilih cenderung memanfaatkan primordialisme karena mereka mengamati kesesuaian antara calon legislator dengan nilai-nilai primordial yang menjadi prioritas dalam masyarakat. Pendekatan primordialisme dalam pemilu mengacu pada pemanfaatan identitas primordial seperti suku, agama, atau etnis untuk memperoleh dukungan politik. Ini sering kali menyebabkan polarisasi dan konflik, menggantikan isu-isu kebijakan yang lebih penting.

Primordialisme dalam politik lokal bisa berdampak signifikan dalam proses pemilihan calon legislatif (caleg). Hal ini terutama terjadi ketika identitas primordial seperti suku, agama, atau etnis menjadi faktor utama dalam memilih caleg, daripada pertimbangan atas program atau kualitas kandidat. Ini bisa memicu polarisasi dan membatasi pembangunan politik yang inklusif. Polarisasi adalah proses atau keadaan di mana opini, keyakinan, atau kelompok dalam masyarakat menjadi terbagi secara tajam antara dua pihak atau lebih, sering kali dengan sedikit ruang untuk kesepakatan atau kompromi di antara mereka.

Pertimbangan atas kualitas program kandidat memang seharusnya menjadi faktor utama dalam pemilihan. Namun, dalam beberapa kasus, pandangan masyarakat terhadap hubungan primordial seperti etnis, agama, atau suku bisa memengaruhi pilihan mereka, meskipun seharusnya tidak menjadi faktor utama.

Dalam dunia politik, seringkali komunikator terpengaruh oleh politik primordial karena keinginan mereka untuk diakui dalam suatu kelompok entitas tertentu, sehingga politik yang

mereka dukung sejalan dengan identitas kelompok mereka. Strategi komunikasi politik bukanlah hal yang mudah, meskipun politik terlihat sebagai sesuatu yang berubah-ubah dan dinamis. Komunikasi politik, khususnya yang terkait dengan ideologi sektoral kelompok, memiliki kompleksitas tersendiri bagi para pelakunya.

Ideologi sektoral kelompok mengacu pada pandangan atau prinsip yang menjadi dasar bagi sebuah kelompok tertentu dalam politik. Ideologi ini cenderung berfokus pada kepentingan atau identitas spesifik dari kelompok tersebut, seperti suku, agama, atau kelas sosial. Contohnya, ideologi sektoral kelompok bisa mencakup nasionalisme etnis, fundamentalisme agama, atau kepentingan kelas pekerja.

Dalam dinamika yang sedang berlangsung, perkembangan politik demokrasi di Indonesia menyebabkan timbulnya dinamika sosial dan politik yang dikenal sebagai politik primordial dan politik identitas. Dua pendekatan tersebut menjadi relevan saat melihat situasi dan dinamika politik dan demokrasi di Indonesia, terutama mengingat peran penting wilayah daerah dalam kontribusinya terhadap perkembangan demokrasi dan politik di tingkat pusat. Daerah menjadi subjek menarik untuk diperbincangkan karena merupakan bagian dari administrasi politik yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pusat.

Isu primordial tetap menjadi bagian dari identitas suatu daerah yang kerap dieksploitasi oleh elit politik untuk memperoleh dukungan pada pilkada. Artinya, dalam konteks tersebut, isu-isu yang berkaitan dengan identitas etnis, agama, atau budaya lokal diperlihatkan atau dipromosikan secara sengaja oleh para politisi untuk menarik dukungan dari pemilih yang terpengaruh oleh faktor-faktor primordial tersebut. Dengan menyoroti sentimen primordial ini, para politisi berharap dapat memperoleh dukungan politik dan suara dalam kontes pemilihan. Isu-isu primordial yang penting bagi masyarakat setempat bisa bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik di wilayah tersebut. Misalnya, di beberapa tempat, isu-isu etnis atau agama mungkin menjadi fokus utama, sementara di tempat lain, isu-isu kebangsaan atau kebudayaan lokal lebih dominan.

Ikatan primordialisme, terutama yang bersifat keagamaan dan etnis, memainkan peran krusial dalam persepsi masyarakat terhadap elektabilitas calon legislatif. Ketika seorang kandidat memiliki ikatan primordialisme yang sejalan dengan ikatan primordialisme masyarakat, hal tersebut menjadi salah satu opsi yang lebih menarik bagi masyarakat dalam proses pemilihan. Keterikatan emosional ini menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan pemilih. Selain didasarkan pada hubungan keluarga, ikatan emosional juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, asal daerah, ras/suku, budaya, dan status sosial ekonomi, yang semuanya merupakan elemen penting dalam kekompakan emosional suatu

komunitas masyarakat tertentu. Hal ini tercermin dalam berbagai basis komunitas di daerah pemilihan, wilayah, atau kantong massa yang ditandai dengan adanya simbol-simbol partai politik, yang menandakan bahwa wilayah tersebut merupakan kantong massa bagi partai tertentu.

Dari sudut pandang sosiologis, proses pemilihan umum ditempatkan dalam konteks sosial yang lebih luas. Secara khusus, pilihan individu dalam pemilu dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (urban atau rural), pekerjaan, pendidikan, kelas sosial, pendapatan, dan agama. Pendekatan sosiologis menekankan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial memainkan peran penting dalam membentuk perilaku pemilih. Faktor-faktor seperti usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, kelas sosial, posisi dalam hierarki sosial, dan ideologi dianggap berpengaruh dalam menentukan perilaku pemilih.

Pomper, dalam penelitiannya tentang hubungan antara predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih, menekankan bahwa faktor-faktor seperti preferensi politik keluarga, agama, tempat tinggal, kelas sosial, dan karakteristik demografis memengaruhi perilaku memilih seseorang. Ini dapat dilihat dari bagaimana preferensi politik orang tua dapat memengaruhi preferensi politik anak. Secara keseluruhan, pandangan dalam pendekatan sosiologis menekankan bahwa faktor eksternal memiliki peran dominan dalam membentuk kondisi sosial yang mempengaruhi perilaku politik individu melalui proses sosialisasi sepanjang hidup mereka. Namun, kritik terhadap pendekatan sosiologis ini mengemukakan bahwa perilaku memilih tidak selalu merupakan tindakan kolektif, melainkan juga merupakan tindakan individual. Meskipun seseorang mungkin terpengaruh oleh norma-norma sosial, tidak ada jaminan bahwa ia akan selalu mengikuti norma tersebut saat memberikan suara, karena ada kemungkinan individu tersebut menyimpang dari norma dan nilai yang ada, atau bahkan bergabung dengan kelompok yang berbeda saat melakukan tindakan politik.

Primordialisme : pemilih basis dalam pemilihan caleg dan presiden dalam perspektif teori identitas sosial di kota Tanjung Pinang Barat

Tipe-tipe pemilih dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian, yaitu:

Pemilih Rasionalis

Pemilih rasionalis adalah tipe pemilih yang menekankan pada kemampuan partai atau kandidat dalam melaksanakan program kerja mereka. Program kerja ini dievaluasi dari dua aspek, yaitu kinerja partai atau kandidat di masa lalu, dan rencana yang diusulkan untuk mengatasi masalah nasional. Kedua faktor ini sangat mempengaruhi keputusan pemilih.

Pemilih tidak hanya melihat program yang ditawarkan, tetapi juga menganalisis apa yang telah dilakukan oleh partai atau kandidat tersebut sebelumnya. Kinerja partai atau kandidat biasanya terlihat dari reputasi dan citra mereka di masyarakat. Dalam hal ini, partai atau kandidat perlu membangun reputasi yang baik di mata publik dengan menekankan kebijakan umum yang mampu menyelesaikan masalah nasional yang dihadapi oleh negara.

Pemilih Tradisional

Pemilih tipe ini memiliki orientasi ideologi yang tinggi terhadap partai politik atau kandidat. Pemilih tradisional ini sangat mengutamakan kedekatan dengan faktor sosial budaya, nilai, asal-usul, keyakinan, dan agama sebagai pertimbangan dalam memilih partai politik atau kandidat. Mereka biasanya tidak terlalu memprioritaskan kebijakan yang diusung oleh partai atau kandidat, seperti kebijakan ekonomi, kesejahteraan, pemerataan pendapatan, pengurangan inflasi, dan sebagainya, yang diletakkan pada urutan kedua. Tipe pemilih ini lebih mementingkan figur dan kepribadian seorang pemimpin, mitos, atau nilai historis dari partai politik atau kandidat. Salah satu karakteristik utama dari pemilih tipe ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sikap sangat konservatif dalam mempertahankan nilai atau keyakinan yang dianut.

Pemilih Skeptis

Pemilih tipe ini memiliki orientasi ideologi yang tinggi terhadap partai atau kandidat, namun tidak menganggap kebijakan sebagai hal yang penting. Mereka juga kurang berminat untuk terlibat dalam masalah partai politik, karena ikatan ideologis mereka cenderung lemah.

Melihat tipe pemilih di atas tadi, dapat kita lihat bahwa menjadi tanggung jawab kita semua untuk memberikan kepercayaan kepada pemilih seperti ini. Pemilih ini perlu diberikan sosialisasi dan motivasi agar menggunakan hak pilih mereka dengan baik dalam pemilu. Ketidakterlibatan mereka dalam pemilu bisa berdampak negatif terhadap kelangsungan sistem demokrasi di Indonesia.

Primordialisme merupakan paham yang menekankan pada keaslian dan kesamaan primordial, seperti suku, etnis, atau agama, sebagai dasar utama identitas sosial seseorang. Dalam konteks politik, primordialisme dapat memainkan peran dengan menggerakkan solidaritas antarindividu atau kelompok yang merasa terikat oleh kesamaan primordial tersebut. Contohnya, ketika calon legislatif yang berhasil mencalonkan diri karena merupakan warga asli Tanjungpinang, menunjukkan bagaimana identitas primordial seperti asal suku atau keaslian lokal dapat menjadi faktor penting dalam mendukung seseorang dalam kompetisi politik. Primordialisme merupakan teori yang menekankan pada keaslian dan kesamaan primordial, seperti suku, etnis, atau agama, sebagai dasar utama identitas sosial seseorang.

Dalam konteks politik, primordialisme dapat memainkan peran dengan menggerakkan solidaritas antarindividu atau kelompok yang merasa terikat oleh kesamaan primordial tersebut. Calon legislatif yang berhasil mencalonkan diri karena merupakan warga asli Tanjungpinang, menunjukkan bagaimana identitas primordial seperti asal suku atau keaslian lokal dapat menjadi faktor penting dalam mendukung seseorang dalam kompetisi politik.

Asosiasi primordial menekankan pada keaslian dan kesamaan primordial, seperti suku, etnis, atau agama, sebagai fondasi utama identitas sosial seseorang. Dalam konteks politik, primordialisme dapat memobilisasi solidaritas antarindividu atau kelompok yang merasa terikat oleh kesamaan primordial tersebut. Sebagai contoh, seorang calon legislatif yang berhasil mencalonkan diri karena merupakan penduduk asli Tanjungpinang, menunjukkan bagaimana asal-usul atau keaslian lokal dapat menjadi faktor kunci dalam mendapatkan dukungan dalam arena politik.

Pola perilaku pemilih di Kecamatan Tanjungpinang Barat dapat dipahami melalui empat pendekatan yang berbeda. Pertama, ada pendekatan sosiologis di mana pemilih memilih berdasarkan faktor seperti suku, agama, tempat tinggal, jenis kelamin, atau hubungan keluarga. Kedua, pendekatan psikologis di mana pemilih mengidentifikasi diri dengan partai politik tertentu. Ketiga, pendekatan rasional di mana pemilih memilih berdasarkan visi, misi, dan program kerja kandidat. Terakhir, pendekatan retrospective voting, yang menilai rekam jejak kandidat. Pemilihan yang didasarkan pada minat terhadap partai politik tertentu dominan di Kecamatan Tanjungpinang Barat.

Sudah menjadi hal yang umum bahwa banyaknya pemilih yang memilih berdasarkan pendekatan sosiologis. Pemilih yang tergolong dalam kategori ini umumnya memiliki kecenderungan untuk menghormati lambang-lambang yang mereka anggap sakral. Di kecamatan Tanjungpinang Barat, para pemilih juga cenderung mempertimbangkan secara rasional dalam menetapkan pilihan mereka pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Visi, misi, dan program kerja yang diusung oleh calon menjadi kriteria utama yang digunakan oleh pemilih untuk mengevaluasi kualitas dan kesesuaian calon tersebut dengan kebutuhan masyarakat.

Banyak yang menyatakan bahwa asal suku memiliki dampak dalam pemilihan karena mengikatkan hubungan kekeluargaan, budaya, bahasa, dan agama. Dalam pemilihan legislatif 2024 di wilayah pemilihan 1 di Kecamatan Tanjungpinang Barat, faktor-faktor penting seperti rekam jejak dan integritas masyarakat menjadi fokus kampanye calon legislatif A. Identitas primordial menjadi pertimbangan bagi pemilih yang memilih A sebagai anggota DPRD kota di Tanjungpinang karena dianggap sebagai warga asli yang dapat dipercaya.

Selain itu, adanya ikatan keluarga juga memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan pemilih dalam menentukan preferensi mereka selama pelaksanaan Pemilu Pemilih di Kecamatan Tanjungpinang Barat umumnya mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang politik melalui interaksi di lingkungan keluarga. Adanya diskusi dan sosialisasi politik di tengah-tengah keluarga menjadi landasan utama bagi pemilih dalam memahami proses politik dan menciptakan pandangan mereka sendiri. Seringkali, keputusan pemilih cenderung dipengaruhi oleh preferensi yang diungkapkan oleh orang tua mereka, yang dianggap sebagai referensi atau panduan dalam menentukan pilihan politik.

Ikatan primordialisme ini tumbuh dari identitas Caleg dan Calon Presiden. Caleg dan Calon Presiden membuat identitas mereka agar dikenal masyarakat, sehingga identitas mereka tersebar ke kalangan masyarakat. Tersebarnya identitas tersebut membuat masyarakat penganut primordialisme melihat Caleg dan Calon Presiden melalui berbagai sisi. Seperti sisi suku, agama, dan ikatan kekeluargaan.

Kemenangan calon legislator A di kecamatan Tanjungpinang Barat dapat disebabkan oleh rekam jejak mereka dalam menjalankan tugas dan memenuhi janji kampanye, yang merupakan faktor rasional dalam pemilihan. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan platform, kebijakan, dan integritas mereka secara menyeluruh.

Primordialisme memiliki peran penting dalam meningkatkan dukungan dan partisipasi pemilih terhadap calon legislatif. Pemilih mungkin cenderung mendukung calon dari latar belakang yang sama dengan mereka secara primordial. Misalnya faktor kemenangan calon legislatif A yaitu karena mereka telah berhasil menjabat dan memenuhi janji kampanye mereka bisa mejadi bagian dari rasional dalam pemilihan karenna ini bisa menunjukkan rekam jejak dan kemampuan mereka untuk memenuhi janji politik, bukan hanya primordialisme. Namun, juga perlu mempertimbangkan platform, kebijakan dan integritas mereka secara keseluruhan kemenangan calon legislator A dapat disebabkan oleh rekam jejak mereka dalam menjalankan tugas dan memenuhi janji kampanye, yang merupakan faktor rasional dalam pemilihan. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan platform, kebijakan, dan integritas mereka secara menyeluruh.

Dampak primordial pada pemilihan umum bisa mencakup preferensi pemilih berdasarkan faktor-faktor seperti suku, agama, atau etnis, daripada pada program atau visi politik kandidat. Ini bisa mengarah pada polarisasi dan konflik antar kelompok, serta mempengaruhi stabilitas politik dan proses demokrasi secara keseluruhan.

Pemilihan DPRD kota sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor primordial seperti asal usul etnis. Namun, kemenangan juga dapat dipengaruhi oleh rekam jejak

dan kinerja calon selama kampanye. Kemenangan caleg A di Kecamatan Tanjungpinang Barat menunjukkan bahwa masyarakat menghargai tanggung jawab dan implementasi janji-janjinya. Ini menunjukkan bahwa kinerja yang nyata dapat memengaruhi pemilih dalam proses pemilihan.

Mengedepankan hubungan primordial seperti wilayah kedaerahan memang dapat menjadi strategi yang efektif bagi seorang calon legislatif (caleg). Hal itu dapat memperkuat ikatan emosional antara caleg dan pemilihnya, serta memanfaatkan identitas lokal untuk mendapatkan dukungan. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa caleg tersebut memiliki kompetensi dan visi yang jelas untuk mewakili konstituennya secara efektif.

Memilih calon legislatif (caleg) berdasarkan kekerabatan memang sering terjadi di banyak tempat, termasuk di kecamatan Tanjungpinang Barat. Hubungan pribadi bisa memengaruhi persepsi seseorang terhadap seorang calon, meskipun sebaiknya juga dipertimbangkan kemampuan dan program kerjanya untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Isu primordial dalam konteks pemilu kedaerahan seringkali mencakup pertimbangan etnis, agama, atau identitas lokal dalam pemilihan calon dan dukungan politik. Ini bisa menjadi masalah jika identitas primordial menjadi faktor utama dalam menentukan dukungan politik, mengabaikan pertimbangan yang lebih substansial seperti kinerja atau platform politik calon. Tarik-menarik kepentingan antara penguasa politik terkait pemilu atau pemilihan kepala daerah dapat mempengaruhi konflik di daerah. Penguasa politik pusat mendorong suksesnya kepemimpinan di daerah untuk memperkuat kekuasaannya, sementara penguasa politik daerah memanfaatkan suksesi sebagai alat transaksional kekuasaan. Penting untuk membatasi dan mengantisipasi konflik politik yang disebabkan oleh isu kepentingan agar tidak bercampur dengan isu primordial, terutama di daerah yang polaritasnya tinggi, guna mencegah konflik sosial. Karena potensi konflik yang besar jika pemilu 2024 tidak memfasilitasi kepentingan publik, terutama karena kekosongan kepemimpinan, pemerintah harus serius dalam menciptakan ketertiban umum dan mencari solusi atas dampak kebijakan yang diterapkan. Di Tanjungpinang Barat atau daerah lainnya, isu primordial seperti identitas kedaerahan dan kebangsaan lokal seringkali menjadi faktor penting dalam pemilihan calon legislatif. Orang-orang mungkin cenderung memilih caleg yang berasal dari wilayah mereka sendiri atau memiliki akar yang kuat di komunitas setempat. Hal ini bisa menjadi cerminan dari rasa kebanggaan dan identitas lokal yang kuat.

Primordialisme memang seringkali memengaruhi pilihan politik di berbagai masyarakat, termasuk di Tanjungpinang Barat. Identifikasi dengan kandidat yang berasal dari

daerah atau kelompok etnis tertentu sering menjadi pertimbangan dalam pemilihan caleg. Pemilih yang memilih Caleg A karena merasa bahwa Caleg A berasal dari satu daerah dapat dipercaya karena adanya rasa kedekatan dan kepercayaan yang timbul dari asal daerah yang sama.

Ketertarikan pemilih terhadap seorang calon legislatif (caleg) biasanya didorong oleh pemahaman bahwa caleg tersebut telah terbukti bertanggung jawab, membantu masyarakat, dan memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Faktor kedaerahan juga seringkali mempengaruhi persepsi ini, karena dianggap bahwa caleg memiliki kewajiban untuk memajukan daerah asalnya.

Janji kampanye untuk membangun gapura di Kabupaten Tanjungpinang Barat oleh Calon Legislatif (Caleg) A adalah langkah yang positif untuk meningkatkan perkembangan daerah tersebut. Ini menunjukkan komitmen untuk memajukan daerah serta memberikan harapan kepada masyarakat akan adanya perubahan positif. Dengan dukungan masyarakat yang percaya pada kemampuan dan komitmen Caleg A, semoga janji tersebut dapat terwujud dan memberikan dampak yang positif bagi Tanjungpinang Barat.

Fenomena primordial dalam pemilu aspek wilayah kedaerahan adalah ketika pemilih cenderung memilih berdasarkan identitas lokal atau regional mereka, seperti suku, agama, atau kebangsaan, daripada mempertimbangkan isu-isu politik atau kebijakan. Hal ini bisa mengakibatkan polarisasi dan pengelompokan yang kuat dalam politik, mengabaikan kepentingan nasional secara keseluruhan.

Jika dilihat melalui kaca mata sosiologis, fenomena ini dapat dianalisis melalui teori identitas sosial. Menurut teori identitas sosial, individu secara aktif mencari untuk berpikir, merasa, dan bertindak sebagaimana yang didefinisikan oleh lembaga budaya, kelompok kolektif, serta norma-norma budaya. Kognisi sosial individu kemudian dianalisis secara kolektif, diinterpretasikan melalui kerangka acuan kelompok mereka, sesuai dengan pendekatan identitas sosial. Sebagai contoh, para imigran mungkin enggan untuk mengadopsi budaya dominan jika mereka merasa bahwa identitas mereka akan terus-menerus diidentifikasi negatif, entah itu karena warna kulit yang berbeda atau aksen bahasa yang berbeda.

Teori identitas sosial adalah bagian dari konsep yang melekat pada individu berdasarkan pengetahuan mereka, yang memperkuat nilai-nilai dan emosi terkait keanggotaan dalam sebuah kelompok sosial (Tutukansa, 2022). Teori Identitas Sosial dapat diterapkan dalam fenomena primordialisme oleh masyarakat kecamatan Tanjungpinang Barat saat Pemilu dengan mempertimbangkan bagaimana pemilih mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok politik tertentu dan bagaimana hal tersebut memengaruhi perilaku pemilih. Pemilih

cenderung memilih kandidat atau partai yang mereka anggap sejalan dengan identitas sosial mereka, yang bisa berdasarkan pada faktor-faktor seperti ideologi politik, agama, etnisitas, atau golongan sosial. Identitas sosial juga dapat memengaruhi persepsi terhadap pesan politik dan sikap terhadap lawan politik.

4. KESIMPULAN

Primordialisme sangat mempengaruhi preferensi pemilih. Pemilih sering kali memilih calon berdasarkan faktor-faktor seperti suku, agama, atau kedaerahan mereka, daripada pertimbangan rasional atau kepentingan yang lebih luas. Hal ini tercermin dalam perilaku pemilih di Kecamatan Tanjungpinang Barat, di mana pendekatan sosiologis dalam memilih seringkali dominan. Namun, ada juga pemilih yang mempertimbangkan aspek rasional seperti visi, misi, dan program kerja calon, serta rekam jejak mereka dalam memenuhi janji kampanye. Selain itu, hubungan pribadi juga bisa memengaruhi persepsi seseorang terhadap seorang calon

Ikatan primordialisme berperan dalam persepsi masyarakat terhadap elektabilitas calon legislatif. Keterikatan emosional dengan faktor-faktor seperti agama, asal daerah, ras/suku, budaya, dan status sosial ekonomi memengaruhi keputusan pemilih. Selain itu, faktor-faktor demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas sosial, pendapatan, dan agama juga berpengaruh dalam membentuk perilaku pemilih. Meskipun demikian, kritik terhadap pendekatan sosiologis menyoroti bahwa perilaku memilih juga merupakan tindakan individual yang bisa menyimpang dari norma sosial yang ada.

Dalam analisisnya, fenomena ini dapat dipahami melalui teori identitas sosial, di mana individu cenderung bertindak sesuai dengan norma-norma budaya dan identitas kelompok mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini penting dalam memahami perilaku pemilih dan hasil pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago, R. R., & Sardini, N. H. (2018). Politisasi identitas dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2018. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Fadhlan, A. N., & Azizah, N. (2022). Politik identitas di pilkada (Studi kasus: Hubungan aksi 212 dalam keterpilihannya Anies-Sandi di pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Jakarta periode 2017 sampai 2022). *Jurnal Communitarian*, 4(2), 649. <http://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/view/316>

- Ir, R., & Ariffin, M. (2024). Perilaku pemilih pemula pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Polwali Mandar Provinsi Sulawesi Barat 2019-2021. *Jurnal Ilmu Pemerintah & Ilmu Komunikasi*, 4(2), 154–164.
- Jonathan, D., Dito, D., Pramana, G. I., & Erviantono, T. (2019). Peran etnisitas dan basis massa anggota DPRD dalam Pemilu legislatif 2019 di Kota Depasar. *Jurnal Ilmiah*, 2(1), 1–10.
- Juanda, I. O. (2024). Politik identitas dan alat pemenangan kontestasi dalam pemilu yang akan mendatang. *Jurnal Ilmiah Multidisplin*, 2, 3–15.
- Kusyadi, M. J., & Yadi, J. (2022). Dinamika posisi identitas etnis Tionghoa di Tanjungpinang dalam tinjauan teori identitas sosial. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 724. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1068>
- Mahendra, I. B. P., Azhar, M. A., & Apriani, K. D. (2019). Strategi newcomer dalam kontestasi politik studi kasus: Keterpilihan anggota DPRD Kota Denpasar dari partai PSI pada Pemilu 2019. *Ojs.Unud.Ac.Id*, 13, 45-59.
- Muhammad, F. F., Musyari, M. I. N., Badil, M., & Rissyel, R. (2024). Fungsi agama dalam perspektif umat Islam di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 3(1), 51–67.
- Nugraha, Y. A., Samian, S., & Riantoputra, C. D. (2020). Anteseden leader endorsement: Perspektif teori identitas sosial. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(3), 227. <https://doi.org/10.7454/jps.2020.22>
- Rinenggo, A. (2022). Prospek sistem dan budaya politik di Indonesia. *WASPADA (Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan)*, 10(01), 6. <https://doi.org/10.61689/waspada.v10i01.308>
- Sejati, S. P., & Hakim, A. B. (2023). Politik primordial dan politik identitas dalam perkembangan demokrasi dan politik lokal di Indonesia. *JOSH: Journal of Sharia*, 2(2), 160. <https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.533>
- Sholahuddin, A. H., Bariah, C., Herniwati, F., Femmy, S., Widodo, I. S., Abqa, M. A., Disantara, F., Paramitha, A. A., Agustiwi, A., Permana, D. Y., Sukma, D. P., Firdaus, F., Suhariyanto, D., & Fuqoha, F. (2023). *Hukum pemilu di Indonesia* (Issue May). <https://www.researchgate.net/publication/372553118>
- Simamora, L., & Yunus, N. (2014). Strategi calon legislatif Kota Pekanbaru dalam meraih suara pada pemilihan umum tahun 2009. *Jom FISIP*, 1(2), 1–15.
- Syafitri, H., & Warsono. (2021). Primordialisme dalam praktek demokrasi di organisasi kemahasiswaan (Konflik sosial dalam pemira BEM Unesa 2020). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 9(3), 672–688. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n3.p672-688>
- Tutukansa, A. F. (2022). Maraknya pengaruh kompleks politik identitas di Indonesia. *Jurnal Khazanah*, 14(1), 22. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol14.iss1.art>